

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardiansyah. (2022). *Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Bagenda, Christina, dkk. (2023). *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Persada Bandung.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P Siregar. (2023). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sentosa Deli Mandiri, Medan.
- Darwis, Rustan et al. (2022). *Hukum Perdata*, Global eksekutif Teknologi, Padang.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok
- Harahap, M. Yahya. (2022). *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imbawani, Djoko. (2013), *Hukum Perdata*, Bandung: Citapustaka.
- Joni, Muhammad. (2015), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Citapustaka.
- Kansil, CST. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Laraswaty, dkk. (2021). *Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahardika, Rahadiyan Veda, dkk. (2022). *Kedudukan Subjek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan*. Jember: UM Jember Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

- M.S, Halim H.S., S.H. (2021). *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Muhaimin. (2020). *Buku Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugrono, S.S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Surakarta.
- Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pateda. (2001). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cetakan II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. (1996). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekarno. (2014). *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta: Coriena.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1985). *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Widodo. (2018). *Konstruksi Nama Orang Jawa Studi Kasus Nama-Nama Modern di Surakarta*. Surakarta: Erlangga.
- Yustisia, Tim Redaksi Pustaka, (2010). *Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Jurnal

- A. F, Ashissiqy. (2021). “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahirab di Disdukcail Kabupaten Karangnyar”. *Journal of Law, Society, and, Islamic Civilization*, 9 (2).
- Dewi, Rina. (2023). “Evaluasi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pengadilan”, *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 1.
- Dewi, Rina. (2023). “Digitalisasi Sistem Peradilan dan Tantangannya bagi Masyarakat Akar Rumput”, *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 3 No. 1
- Laraswaty, dkk. (2021). “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilann Negeri Mataram)”. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, I(3).
- Santoso, Budi. (2021). “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Ganti Nama”, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 8 No. 2.
- Sartika, Maya. (2019). “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 2, Nomor 1
- Sinuraya, dkk. (2023). “Kepentingan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan (Studi Kasus Perda RT/RW Provinsi Riau No 10 Tahun 2018)”. *Journal on Education*, 5(2).
- Yustina. (2020). “Prosedur dan Alasan Permohonan Ganti Nama di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1

C. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5606).

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan

D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Aziz, Muhammad Fauza. (2020). *Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Indrawan, Robby Bagus. (2022). *Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan*, Universitas Bandar Lampung.

Permadi, A.A Sg Tyana Candra Dewi. (2023). *Tinjauan Yuridis Pengubahan Nama Seorang Anak pada Akta Kelahiran Menurut Hukum Perdata*, Universitas Pendidikan Nasional.

E. Lain- Lain

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Terkait Program Kolaborasi Antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Dispendukcapil Kota Surabaya <https://disdukcapil.surabaya.go.id/tag/lontong-balap/> diakses pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 16.02.

Prosedur Penanganan Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya <https://pn-surabayakota.go.id/biaya-perkara/> diakses pada tanggal 01 Juni 2025 Pukul 12.24.

Persyaratan Permohonan Pergantian Nama Di Pengadilan Negeri Surabaya <https://pn-surabayakota.go.id/e-brosur/> diakses pada tanggal 31 Mei 2025 Pukul 20.14.

F. Wawancara

Wawancara, Elfa Masyitah, Petugas Dispenduk, Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya, 15 April 2025.

Wawancara, Frendika Suda Utama, S.H., M.H., Ketua LBH Legundi, Advokat sekaligus petugas Posbakum, Pengadilan Negeri Surabaya, Surabaya, 12 Mei 2025.

Wawancara, Silfi Yanti Zulfa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kantor Pengadilan Negeri Surabaya, Surabaya, 9 Mei 2025.

